

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena stunting ini menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia karena dapat menyebabkan kecerdasan tidak maksimal, mudah sakit, dan produktivitas menurun di masa depan. Secara global, UNICEF mencatat bahwa stunting berdampak pada penurunan fungsi kognitif, kapasitas belajar, dan produktivitas jangka panjang, sehingga menjadi ancaman serius bagi kualitas generasi masa depan. Kondisi ini memposisikan stunting bukan sekadar isu kesehatan, tetapi sebagai tantangan pembangunan berkelanjutan.

Stunting pada balita dapat disebabkan karena kurangnya nutrisi selama kehamilan. Status gizi pada ibu hamil sangat mempengaruhi keadaan kesehatan dan perkembangan janin. Faktor lain yang berhubungan dengan stunting adalah asupan ASI eksklusif pada balita. Balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan berisiko tinggi mengalami stunting (Fikadu, Assegid and Dube, 2014).

Di Indonesia, komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting telah menjadi prioritas nasional, menurut hasil survei SSGI menyatakan bahwa prevalensi stunting mengalami fluktuasi sejak awal tahun 2020 dari 24,4% pada 2021 turun menjadi 21,6% pada 2022, kemudian terus menurun ke angka 19,8% menurut hasil SSGI 2024, namun masih jauh dari target 14% yang ditetapkan dalam RPJMN. Penurunan ini menunjukkan adanya kemajuan, tetapi sekaligus mengungkapkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih membutuhkan penguatan kebijakan dan implementasi di lapangan. Pemerintah merumuskan berbagai strategi, salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pentingnya konvergensi lintas sektor, integrasi layanan, serta kolaborasi berjenjang dari pusat hingga desa.

Pemerintah melalui dinas dinas terkait khususnya Dinas Kesehatan memiliki peran penting untuk menangani kasus stunting yang semakin meningkat dengan

gerakan pencegahan stunting dimulai sejak awal kehamilan. Berdasarkan Peraturan presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting mengamanatkan berbagai strategi dan program termasuk pembentukan tim koordinasi TPPS di tingkat pusat, daerah dan desa, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala (JDIHBPK, 2021). Perpres tersebut menekankan lima pilar percepatan penurunan stunting, termasuk penguatan intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan komunikasi perubahan perilaku, serta pemantauan dan evaluasi. Intervensi stunting merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan (Hidayat, 2023).

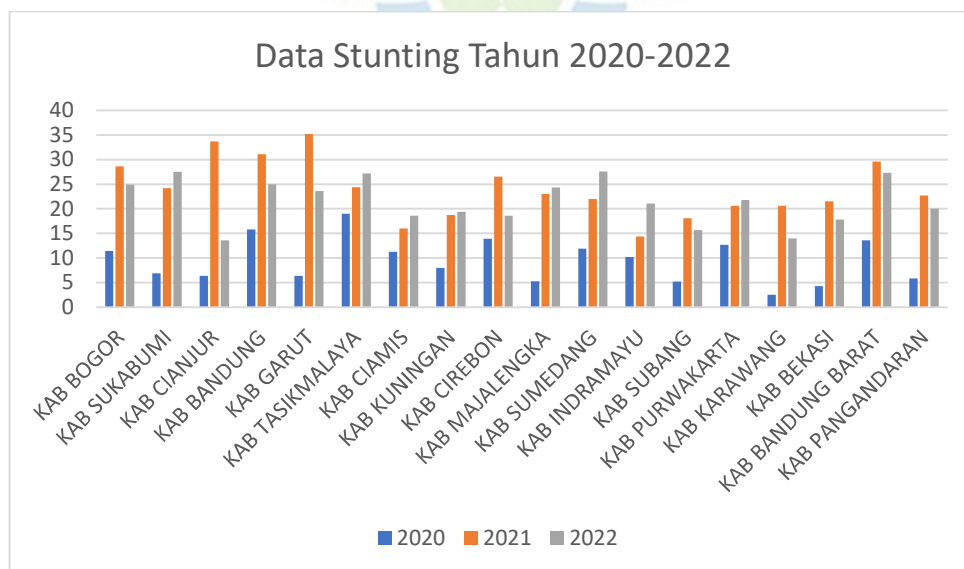
Pada tingkat provinsi, Jawa barat Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tantangan pemenuhan gizi dan kesehatan anak di Jawa Barat sangat kompleks dan berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Dini Nabila Aryani, 2024). Stunting, yang ditandai dengan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, menjadi indikator penting kualitas sumber daya manusia (SDM) dan keberhasilan pembangunan kesehatan (DiskesJabar, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting, namun angka kasus masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting di Jawa Barat berada pada kisaran 20,0%, yang berarti satu dari lima balita masih mengalami stunting. Meskipun angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada SSGI 2021 yang mencatat sekitar 24,5%. Gap antara capaian dan target masih cukup besar sehingga dibutuhkan percepatan intervensi yang lebih terarah.

Selain Kabupaten Sukabumi, sejumlah kabupaten dan kota lain di Jawa Barat juga menjalankan berbagai program percepatan penurunan stunting sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kota Bogor, misalnya, mengembangkan program Bogor Cegah Stunting (BOCES) yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan ibu dan anak melalui puskesmas dan kader kelurahan

(Pemkot Bogor, 2023). Kabupaten Sumedang menerapkan inovasi SIGAP, yaitu sistem digital untuk memetakan dan memantau balita berisiko stunting secara real-time. Inovasi ini dinilai efektif dan menjadi rujukan nasional karena berhasil mempercepat penurunan stunting di daerah tersebut (Kominfo, 2023). Kabupaten Bandung Barat juga menjalankan Gerakan Sabilulungan Cegah Stunting yang menekankan edukasi gizi dan perbaikan sanitasi berbasis desa (Pemkab Bandung Barat, 2023).

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu wilayah dengan cakupan wilayah sangat luas, jumlah desa terbanyak di Jawa Barat, serta kondisi geografis yang variatif. Kondisi ini berdampak pada distribusi layanan kesehatan, pemerataan kualitas posyandu, serta pelaksanaan program intervensi gizi. Kabupaten Sukabumi juga merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan perhatian karena indikasi kenaikan atau fluktuasi jumlah balita stunting pada rentang waktu beberapa tahun terakhir.

Gambar 1. Data Stunting Berdasarkan Kabupaten di Jawa barat



Sumber: Open data Jabar, 2025 (Diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan gambar 1. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan dinamika prevalensi stunting yang mencolok dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. Berdasarkan data yang tersedia,

prevalensi stunting di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 tercatat sebesar 6,89 persen. Namun, pada tahun 2021 angka tersebut meningkat tajam menjadi 24,4 persen, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 hingga mencapai 27,5 persen. Lonjakan yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya permasalahan yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan gizi atau kesehatan individu, melainkan mengindikasikan adanya persoalan yang lebih kompleks, termasuk dalam aspek tata kelola dan implementasi kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus melakukan upaya untuk menekan peningkatan kasus stunting. Dalam pelaksanaannya melalui Instruksi Bupati Nomor 11 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gerakan Aksi Deteksi Dini Stunting Pemerintah Kabupaten Sukabumi, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perangkat daerah, dan pemerintah desa untuk mengimplementasikan program yang telah ditetapkan, yakni Gerakan Aksi Deteksi dan Intervensi Stunting di Sukabumi (GADIS SUKABUMI). Program ini merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dirancang untuk menurunkan angka stunting pada anak dan ibu hamil di wilayah Kabupaten Sukabumi. Inisiatif ini juga menjadi fokus penting bagi pemerintah pusat maupun daerah, dengan target pencapaian 14% pada tahun 2024 yaitu tidak adanya penambahan kasus stunting baru (Zero New Stunting). Diselenggarakannya program ini dikarenakan timbulnya keperihatinan pemerintah Khususnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap banyaknya balita dan baduta yang mengalami kondisi stunting, agar tidak timbul kasus baru serta masih minimnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Sukabumi mengenai dampak buruk stunting.

Secara khusus program ini dibentuk untuk mendeteksi dan intervensi angka stunting yang meningkat di Kbupaten sukabumi. Dateksi penyebab stunting (GADIS Sukabumi) melalui riwayat ibu, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, riwayat pengasuhan, riwayat kesehatan, kondisi lingkungan, kondisi sosek, dan akses pangan. Kemudian intervensi secara spesifik kegiatan yang mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan dengan kelompok sasaran 1000 HPK dan kelompok sasarn usia remaja putri dan wanita usia subur serta anak 24-59 bulan.

Tabel 1. Jumlah Balita Stunting kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2024

Tahun	Persentase
2021	24,2%
2022	27,5%
2023	27%
2024	20,5%

Sumber : Open data jabar, 2025

(data diolah Peneliti 2026)

Data pada Tabel 1 menunjukkan dinamika jumlah balita stunting di Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu Pada tahun 2021, persentase balita stunting berada pada angka 24,2%. Angka ini kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 27,5 %, dan meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023, persentasenya masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu 27%. Perubahan yang lebih positif tampak pada tahun 2024, ketika angka stunting menurun cukup signifikan menjadi 20,5%. Perubahan yang lebih positif baru terlihat pada tahun 2024, ketika prevalensi stunting menurun cukup signifikan menjadi 20,5%. Kendati demikian, capaian tersebut masih belum memenuhi target nasional prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020–2024. Dengan demikian, meskipun terdapat upaya penurunan, data ini menegaskan bahwa Kabupaten Sukabumi masih menghadapi tantangan serius dalam menekan angka stunting secara konsisten dan berkelanjutan.

Fluktuasi yang terjadi selama empat tahun ini menunjukkan bahwa implementasi program intervensi, termasuk Program GADIS Sukabumi, belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan penurunan stunting yang stabil. Kondisi ini memperlihatkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait efektivitas deteksi dini, kualitas layanan posyandu, koordinasi lintas sektor, serta aspek sumber daya pendukung lainnya.

Tabel 2. Jumlah Kasus Stunting Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Kecamatan dan Desa Tahun 2023 (14 Kasus teratas)

NO	Kecamatan	Desa	Jumlah Kasus (Anak)
1	Sukalarang	Sukalarang	91
2	Sukalarang	Ttisan	47
3	Nyalindung	Cijangkar	41
4	Kabandungan	Kabandungan	41
5	Pabuaran	Sirnasari	40
6	Sukalarang	Prianganjaya	39
7	Surade	Kadaleman	39
8	Kadudampit	Sukamaju	38
9	Kadudampit	Cikahuripan	37
10	Kabandungan	Cipeuteuy	37
11	Surade	Citanglar	36
12	Pabuaran	Bantasari	36
13	Jampang Tengah	Padabeunghar	36
14	Cisaat	Sukaresmi	35
...			

Sumber: Open Data Kabupaten Sukabumi, 2024

Dioalah Peneliti (2026)

Data lebih lanjut pada tabel 2 mengenai persebaran kasus balita stunting di tingkat kecamatan dan desa pada tahun 2023 menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Kabupaten Sukabumi tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada sejumlah kecamatan tertentu, dengan Kecamatan Sukalarang mencatatkan jumlah kasus tertinggi.

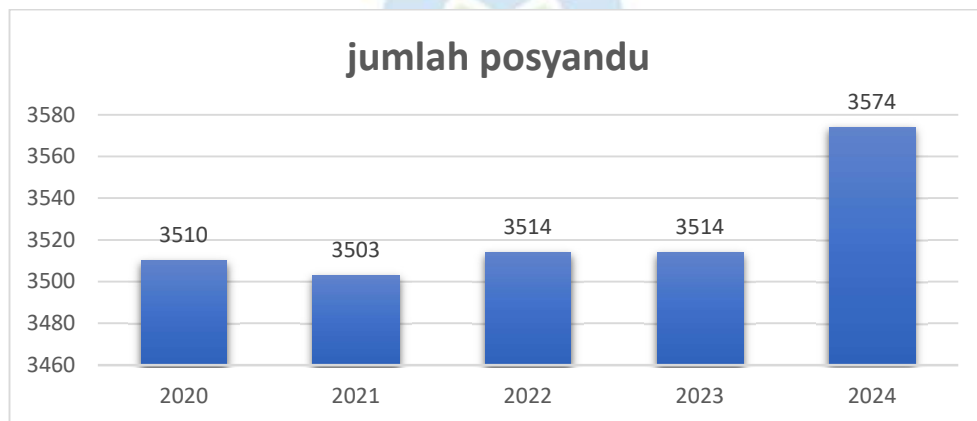
Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi memerlukan pendekatan implementasi kebijakan yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata, tidak terkecuali kecamatan dengan jumlah kasus yang relatif lebih rendah, mengingat Program GADIS pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan yang berlaku menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten.

Berdasarkan kajian BP2D JABAR dalam Bahan detail operasional GADIS Sukabumi, menyampaikan faktor determinan penyebab stunting di Kab. Sukabumi adalah kemiskinan, kondisi rumah, pola asuh dan perkawinan anak. Selain itu berdasarkan fenomena dan hasil observasi masih ada sebagian warga yang

menganggap bahwa imunisasi dan vaksinasi pada balita menyebabkan anak sakit demam sehingga enggan untuk melakukan hal tersebut, sehingga di butuhkan pemahaman mendalam kepada masyarakat terkait dampak stunting pada anak.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah tentunya memikirkan strategi apa yang dapat menekan angka stunting ini. Program GADIS Sukabumi yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terus berkomitmen dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama komponen, dimulai dari Dinas Kesehatan hingga ke tingkat bawah yakni posyandu bersama para kader untuk menciptakan Kabupaten Sukabumi kedepan menjadi new zero stunting.

Gambar 2. Jumlah Posyandu di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024

Berdasarkan gambar 2. Terdapat 3.574 posyandu pada tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi. Dari jumlah tersebut, posyandu aktif sebanyak 3.360 atau 94%, sedangkan posyandu tidak aktif 214 posyandu atau 6% (DINKES, 2025).

Jumlah Posyandu sesuai tabel di atas menunjukkan adanya penurunan dan peningkatan/perkembangan dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan jumlah, jumlah posyandu pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 3.574 Posyandu, peningkatan ini dikarenakan adanya pembinaan dan revitalisasi posyandu yang terus-menerus oleh beberapa lintas sektor terkait dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Namun secara umum jumlah posyandu terbanyak selama periode 2020 - 2024 yaitu tahun 2024 menjadi 3.574 posyandu yang terdiri dari

posyandu tidak aktif sebanyak 214 Posyandu dan Posyandu Aktif sebanyak 3.360 Posyandu sedangkan Jumlah Posyandu terendah yaitu pada tahun 2021 sebanyak 3503 Posyandu (DINKES, 2025). Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah posyandu meningkat, tidak semua posyandu mampu menjalankan peran secara optimal dalam deteksi dini maupun intervensi stunting.

Selain perkembangan jumlah posyandu, perlu dicermati pula kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional posyandu. Berdasarkan *Open Data Jabar*, pada tahun 2020 Kabupaten Sukabumi memiliki sebanyak 17.003 kader posyandu. Jumlah tersebut menunjukkan ketersediaan tenaga kader yang cukup besar untuk menjalankan fungsi pelayanan dasar masyarakat. Namun demikian, banyaknya kader tidak selalu diikuti dengan keseragaman kompetensi, mengingat masih ditemukan permasalahan seperti tidak meratanya pelatihan kader, kurangnya pendampingan teknis, serta keterbatasan penggunaan alat ukur standar di sejumlah posyandu.

Dinas kesehatan Kabupaten Sukabumi Dalam pelaksanaan Program GADIS Sukabumi, memegang peran sebagai koordinator teknis dalam upaya penanggulangan stunting. Peran ini sejalan dengan ketentuan Kementerian Kesehatan melalui Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat, yang menegaskan bahwa dinas kesehatan kabupaten/kota bertanggung jawab melakukan pembinaan teknis, supervisi, serta penguatan mutu layanan kesehatan masyarakat. Sebagai koordinator teknis, Dinas Kesehatan memastikan standar operasional deteksi dini dan intervensi stunting diterapkan secara konsisten oleh puskesmas dan posyandu, termasuk pemenuhan alat antropometri standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Antropometri Anak. Pada bidang Upaya dan Pembiayaan Kesehatan, dinas kesehatan berperan dalam penyusunan perencanaan kebutuhan layanan, pengelolaan anggaran kesehatan seperti DAK dan program gizi, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, dinas kesehatan bertanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan data stunting secara berjenjang, sebagaimana diarahkan dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan

Stunting (Stranas Stunting) 2018-2024, yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam koordinasi lintas sektor. Dengan seluruh fungsi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi menjadi penggerak utama dalam memastikan Program GADIS berjalan efektif, terstandar, serta mampu memperkuat sistem deteksi dini dan intervensi stunting di tingkat masyarakat.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua posyandu memiliki alat ukur yang standar, tidak semua kader mendapatkan pelatihan berkelanjutan, dan kehadiran balita pada hari posyandu masih rendah di beberapa wilayah. Selain itu, faktor geografis seperti desa yang terpencil dan sulit dijangkau membuat pelaksanaan deteksi dini menjadi tidak merata. Tantangan lainnya terkait dengan kapasitas TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) desa dalam menyusun rencana kerja konvergensi, mengelola anggaran desa untuk stunting, serta melakukan pelaporan sesuai mekanisme yang ditetapkan (DINKES, 2025).

Fakta ini penting karena posyandu merupakan ujung tombak program, termasuk dalam pelaksanaan GADIS (Gerakan Aksi Deteksi dan Intervensi Stunting) dalam rangka menekan angka stunting, yang di luncurkan wakil bupati Sukabumi. Program ini dirancang untuk menurunkan angka stunting dan mewujudkan target jabar Zero New Stunting. Selain itu Program ini dirancang sebagai strategi lokal Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat deteksi dini dan intervensi stunting melalui kegiatan yang terstruktur, kolaboratif, dan menyasar sasaran secara langsung. Program ini melibatkan berbagai aktor dan Dinas Kesehatan sebagai leading sector, Puskesmas sebagai pelaksana teknis, TPPS Kabupaten/Kecamatan/Desa sebagai koordinator, pemerintah desa sebagai penyedia dukungan anggaran dan kader, serta kader posyandu sebagai pelaksana lapangan.

Namun berjalannya sebuah program tidak bisa dipungkiri pasti ada tantangan yang harus di hadapi. Dalam pelaksanaan program GADIS Sukabumi ini beberapa tantangan yang di hadapi berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Devi salah satu penanggung jawab program di DINKES Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa dalam identifikasi dan pengumpulan data banyak temuan dimulai dari data BNBA

(by name by address) tidak akurat, Data penyebab/Determinan BNBA tidak diketahui, peralatan antropometri yang tidak sesuai standar, kemampuan kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan belum maksimal dan masyarakat belum memahami dampak stunting

Berdasarkan hasil pengamatan awal, terdapat urgensi untuk menilai bagaimana program dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk menekan angka stunting di kabupaten sukabumi. Dengan demikian peneliti diarahkan untuk mengkaji dan menilai implementasi program GADIS Sukabumi. Atas dasar itu peneliti menetapkan judul **“Implementasi Program Gerakan Aksi Deteksi dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi”**

B. Identifikasi Masalah

1. Prevalensi stunting di kabupaten sukabumi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dan Fluktuasi angka stunting dalam periode 2020-2024, serta belum mencapai target nasional penurunan stunting sebesar 14% menunjukkan bahwa implementasi Program GADIS belum berjalan optimal, meskipun program telah dirancang untuk memperkuat deteksi dini dan intervensi.
2. Kualitas pelaksanaan layanan posyandu belum merata, ditandai dengan masih adanya posyandu tidak aktif, peralatan antropometri yang belum standar, dan rendahnya kehadiran balita pada kegiatan posyandu.
3. Kapasitas kader posyandu dan tenaga pelaksana program belum optimal, karena pelatihan tidak merata, keterampilan pemantauan pertumbuhan masih terbatas, serta belum semua kader memahami SOP deteksi dini stunting.
4. Pengelolaan dan akurasi data stunting masih menghadapi kendala, antara lain data By Name By Address (BNBA) yang belum sepenuhnya akurat serta belum teridentifikasinya secara lengkap determinan penyebab stunting pada tingkat individu dan keluarga.
5. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak stunting masih rendah, ditunjukkan oleh masih adanya persepsi keliru terkait

imunisasi, rendahnya partisipasi dalam kegiatan posyandu, serta pola asuh dan perilaku kesehatan yang belum mendukung pencegahan stunting.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *komunikasi* Program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana *Sumber daya* dalam Program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana *Disposisi* atau sikap pelaksana program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi?
4. Bagaimana *Struktur birokrasi* Program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui *komunikasi* Program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi.
2. Mengetahui *Sumber daya* dalam Program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi.
3. Mengetahui *Disposisi* atau sikap pelaksana Program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi.
4. Mengetahui *Struktur birokrasi* Program Gerakan Aksi Deteksi Dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian implementasi kebijakan publik di sektor kesehatan. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi).

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi program kesehatan berbasis masyarakat, terutama dalam konteks penanganan stunting di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi akademisi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai inovasi daerah, tata kelola lintas sektor, dan model implementasi program dalam kebijakan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten sukabumi, Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai sejauh mana Program GADIS telah dilaksanakan sesuai pedoman, khususnya dalam mengidentifikasi kendala implementasi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah daerah dalam merancang perbaikan kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta memperkuat strategi percepatan penurunan stunting.
- b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten sukabumi, Penelitian ini menyediakan informasi empiris mengenai efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan GADIS. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki tata kelola program, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader posyandu, serta memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi.
- c. Bagi TPPS (Tim Percepatan penurunan stunting) Kabupaten/kecamatan/desa, Penelitian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana koordinasi, pelaksanaan tugas, serta pemahaman tim pelaksana terhadap kebijakan GADIS sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkuat fungsi TPPS dalam sinkronisasi program, perencanaan intervensi, dan optimalisasi penggunaan anggaran stunting di tingkat desa.

- d. Bagi pemerintah Desa dan Kader Posyandu, Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dan kader posyandu untuk memahami peran strategis mereka dalam implementasi program, serta menyadari tantangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas layanan posyandu, khususnya dalam deteksi dini dan intervensi stunting.
- e. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam studi mengenai implementasi kebijakan kesehatan, inovasi daerah, serta program percepatan penurunan stunting. Temuan penelitian juga membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih spesifik, seperti efektivitas program GADIS, studi kasus posyandu tertentu, atau evaluasi dampak program secara longitudinal.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan kondisi faktual yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi masih menghadapi permasalahan stunting yang cukup serius. Data prevalensi stunting dalam empat tahun terakhir memperlihatkan bahwa meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, angka tersebut masih belum mencapai target nasional 14% yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Tingginya angka stunting serta belum tercapainya target penurunan tersebut menjadi input utama dalam penelitian ini. Kondisi ini menggambarkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat intervensi pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting secara sistematis dan terukur.

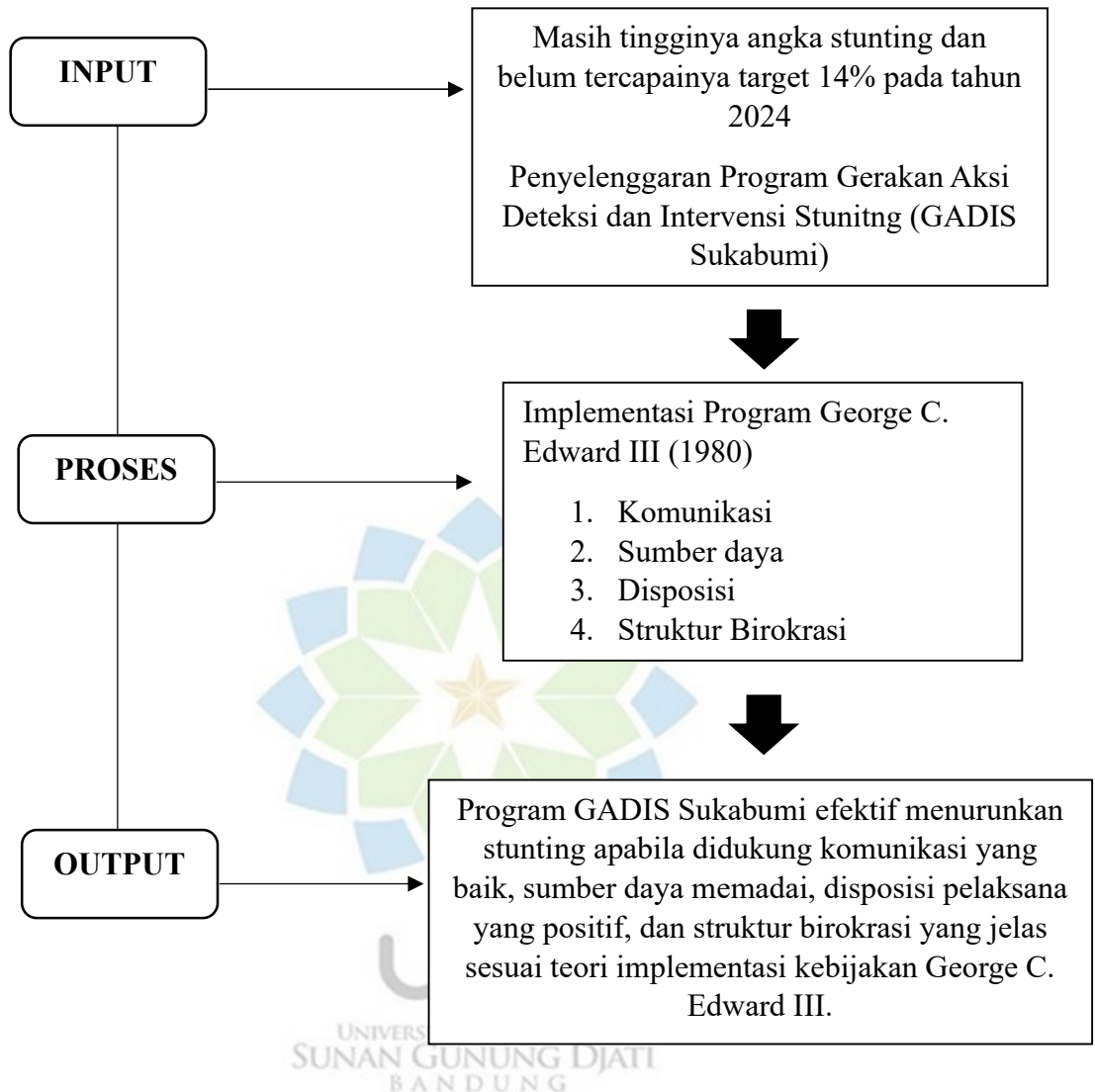
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menginisiasi Program Gerakan Aksi Deteksi dan Intervensi Stunting (GADIS) sebagai bentuk implementasi komitmen daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting yang telah diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Program GADIS menjadi bagian dari proses kebijakan, karena program ini berfungsi sebagai instrumen operasional pemerintah daerah dalam melakukan deteksi dini faktor risiko stunting, pemeriksaan kesehatan, intervensi gizi, hingga edukasi perilaku hidup sehat kepada

masyarakat. Pelaksanaan program melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, TPPS, pemerintah desa, hingga kader posyandu sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan.

Untuk memahami bagaimana program GADIS dijalankan dan sejauh mana efektivitasnya dalam merespons permasalahan stunting di Kabupaten Sukabumi, penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III (1980) sebagai kerangka analisis utama. Model tersebut menilai keberhasilan implementasi kebijakan melalui empat variabel penting. Pertama komunikasi, yang berhubungan dengan kejelasan informasi, konsistensi penyampaian pesan kebijakan, dan pemahaman para pelaksana terhadap tujuan dan mekanisme program. Kedua, sumber daya, baik dari aspek kualitas dan kuantitas tenaga pelaksana, kecukupan anggaran, kelengkapan sarana prasarana, hingga ketersediaan alat antropometri dan bahan intervensi gizi. Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana, yang mencakup komitmen, motivasi, dan tingkat penerimaan pelaksana terhadap kebijakan. Keempat, struktur birokrasi, termasuk standar operasional prosedur (SOP), alur koordinasi, fragmentasi kewenangan, dan tata kelola organisasi yang mempengaruhi kelancaran implementasi program.

Hasil dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan output penelitian, yaitu gambaran menyeluruh mengenai Implementasi Program Gerakan Aksi Deteksi dan Intervensi Stunting (GADIS) di Kabupaten Sukabumi. Output ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai efektivitas program, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan hubungan logis antara permasalahan stunting sebagai input, penyelenggaraan program GADIS sebagai proses kebijakan, implementasi berdasarkan model Edward III sebagai proses analitis, hingga output berupa hasil implementasi program di Kabupaten Sukabumi.

Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Diolah oleh peneliti 2026